

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perekonomian global terus menghadapi berbagai rintangan, dimulai dari krisis, konflik geopolitik, hingga ketidakstabilan iklim, yang berefek negatif pada realisasi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) periode 2030. SDGs diartikan sebagai serangkaian tujuan global yang ditentukan oleh PBB guna menangani beragam kendala ekonomi, sosial serta lingkungan yang dunia hadapi saat ini. Kini SDGs dijadikan kata kunci terpenting dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan, yang landasannya dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kesetaraan (United Nations, 2024).

Salah satu fokus utama dari 17 SDGs yang menjadi petunjuk pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah SDGs ke-8, yang menggarisbawahi pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pondasi utama dalam meraih pembangunan berkelanjutan di tingkat global (Hossain et al., 2022). Karena itu, banyaknya negara menjadikan isu pertumbuhan ekonomi sebagai aspek utama yang krusial ketika mempelajari pembangunan ekonomi.

Menurut Yilanci et al. (2023), sekian dari banyaknya negara masih belum mampu meraih pertumbuhan berkelanjutan, dikarenakan kesulitan dalam melakukan transisi dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Hal ini, menghalangi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Fenomena ini dikenal sebagai “*perangkap pendapatan menengah*”

atau “*Middle Income Trap*” (MIT). MIT ialah fenomena yang umumnya dirasakan oleh negara-negara berkembang yang kesulitan mempertahankan momentum dalam upaya meningkatkan perekonomiannya (Maryanti et al., 2023).

Untuk dapat mengetahui apakah negara tersebut terjebak MIT atau tidak, Felipe dalam publikasinya menjelaskan bahwa negara yang tergolong sebagai *Lower Middle-Income* diberikan waktu 28 tahun untuk bisa bertransisi ke pendapatan *Middle Income*, sedangkan negara di kategori *middle income* mempunyai tenggang waktu 14 tahun untuk beralih ke pendapatan *high income* (Pensaengon, 2022).

Berdasarkan klasifikasi terbaru dari World Bank (2018), perekonomian global dibagi menjadi beberapa kategori menurut GNI Per Kapita, yang dihitung dengan Atlas method. Klasifikasi ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu: *Low Income* (< 1,135 USD), *Lower Middle-Income* (1,136 - 4,465 USD), *Middle Income* (4,466 - 13,845 USD), dan *High-Income* (> 13,846 USD).

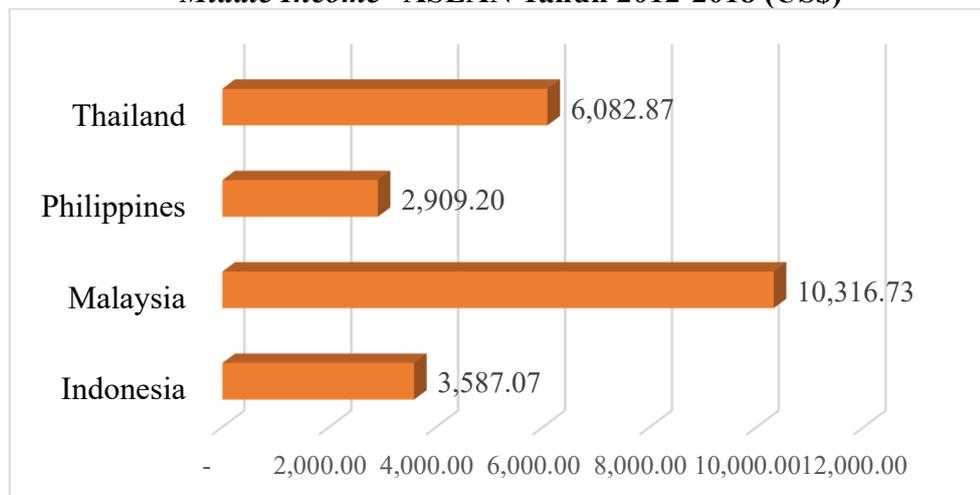
Asia, sebagai kawasan ekonomi yang berkembang pesat, menyumbang separuh dari *Produk Domestik Bruto* (PDB) dunia serta sepertiga dari jumlah output global. Namun, potensi besar ini terancam oleh berbagai kerentanan, baik dari dinamika perekonomian dunia maupun tantangan internal seperti ketimpangan pembangunan, keterbatasan inovasi, hingga rendahnya produktivitas. Jika kendala ini tidak bisa diatasi, maka banyak

negara di kawasan ini, akan terjebak *Middle-Income Trap* (MIT) termasuk anggota ASEAN (Simanjuntak, 2024).

ASEAN ialah wadah kerja sama ekonomi di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, dipicu oleh keanekaragaman ekonomi dan sumber daya alam di tiap negara anggotanya (Anam, 2023). Terdapat 10 negara ASEAN yang dikelompokkan oleh Bank Dunia menjadi tiga kelompok pendapatan: *Lower Middle-Income* (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam), *Middle Income* (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand), dan *High-Income* (Singapura, Brunei Darussalam).

Negara berpendapatan mengah (*middle income country*) menjadi fokus penelitian ini dikarenakan mereka menempati posisi yang krusial untuk bisa bertransisi ke status negara maju. Tantangan utama yang dihadapi meliputi lambatnya adopsi teknologi, terbatasnya reformasi ekonomi, dan buruknya kualitas institusi. Solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini, antara lain reformasi internal yang signifikan serta dukungan dari komunitas internasional. Hambatan ini tidak hanya menghambat perkembangan nasional tetapi juga memengaruhi kontribusi negara-negara ini terhadap pembangunan regional maupun global. Hal ini diperlihatkan faktanya terdapat 4 dari 10 anggota ASEAN yang terjebak dalam MIT, khususnya kategori *middle income* yaitu Indonesia, Malaysia, Philippines, serta Thailand, yang sedang dihadapi hambatan besar untuk bisa bertransisi ke negara *High-Income*.

**Gambar 1. Grafik Rata-rata GDP Per Kapita Negara MIT kategori “Middle Income” ASEAN Tahun 2012-2018 (US\$)**



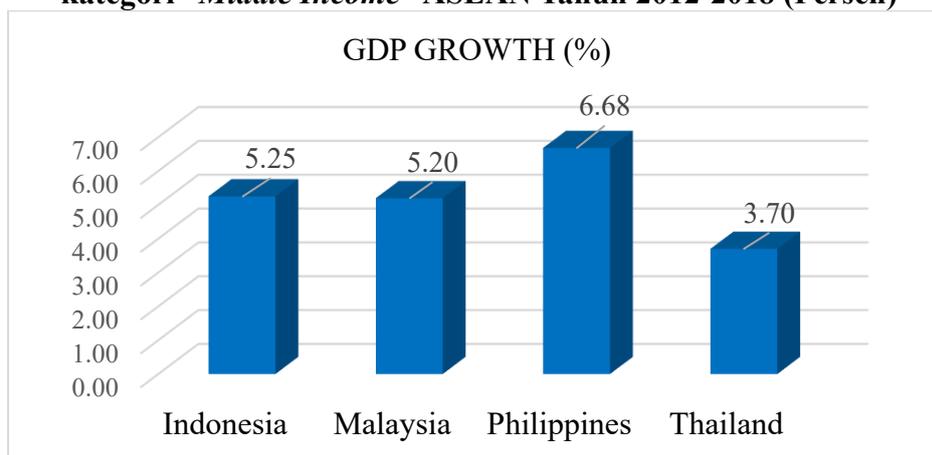
Sumber: Word Bank, data diolah

Grafik 1.1. memperlihatkan variasi rata-rata pendapatan per kapita di empat negara ASEAN yang masuk kategori *middle income* dalam jebakan MIT. Malaysia memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar 10.316,73 USD yang menempati urutan pertama, diikuti oleh Thailand 6.082,87 USD, Indonesia 3.578,07 USD, dan Philippines 2.909,20 USD. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan kesejahteraan antar negara *middle income* ASEAN. Meski memiliki pendapatan per kapita tertinggi, Malaysia tetap dihadapi masalah dalam memperbaiki struktural perekonomiannya untuk bisa meraih status negara *high-income*.

Secara umum, negara dengan pendapatan per kapita tinggi seringkali mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat namun stabil, karena telah mendekati kondisi *full employment*. Situasi ini membatasi kesempatan kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut (Aulia, 2017). Namun, hal ini tidak berlaku bagi negara-negara *middle income* ASEAN, yang masih mempunyai ruang bagi pertumbuhan ekonominya karena mereka belum

mendekati kondisi *full employment*. Peluang ini bisa direalisasikan ketika negara tersebut fokus penyelesaian rintangan struktural dan berusaha keluar dari jebakan MIT dengan meningkatkan produktivitas serta inovasi, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 1. 1. Grafik Rata-rata pertumbuhan ekonomi Negara MIT kategori “Middle Income” ASEAN Tahun 2012-2018 (Persen)**



Sumber: Word Bank, data diolah

Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan variasi rata-rata pertumbuhan ekonomi di empat negara ASEAN yang terjebak MIT, kategori *middle income*. Meskipun memiliki pendapatannya rendah, Philipines berhasil meraih rata-rata tertinggi pertumbuhan ekonominya sebesar 6.68%, diikuti oleh Indonesia 5.25%. Tingginya pertumbuhan ekonomi memberikan peluang bagi kedua negara agar bisa mempercepat proses konvergensi, asalkan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhannya dengan konsisten.

Di sisi lain, Malaysia dan Thailand memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang lambat meski pendapatann per kapitanya tertinggi, di masing-masing sebesar 5.20% dan 3.70%. Situasi ini menandakan adanya hambatan

struktural yang signifikan untuk menghalangi kedua negara tersebut keluar dari jebakan MIT, akibat keterbatasan adopsi teknologi, rendahnya tingkat produktivitas dan inovasi, serta menurunnya daya tarik investasi asing. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi ekonomi untuk bisa menarik daya saing, mendiversifikasi sektor ekonomi, dan memperkuat kebijakan inovasi untuk mendukung proses konvergensi.

Konvergensi merupakan gagasan yang mengemukakan bahwa seiring berjalannya waktu, negara-negara industri dan berkembang cenderung bergerak mendekati tingkat kesejahteraan yang sama (Barro, 2015). Terdapat dua konsep utama dalam konvergensi, yaitu konvergensi sigma ( $\sigma$ ), guna untuk mengukur penurunan kesenjangan pendapatan antar negara/wilayah. Sementara, konvergensi beta ( $\beta$ ) merujuk pada *catching up effect*, yaitu kemampuan negara/wilayah berpendapatan rendah untuk berkembang lebih cepat dibandingkan negara berpendapatan tinggi. Kunci utama untuk mengetahui terjadinya konvergensi beta ( $\beta$ ) dengan menambahkan faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di negara terbelakang.

Dalam ekonomi, *catching up effect* berargumen bahwa negara maju berada di tingkat pendapatan yang relatif stabil, sehingga potensi meningkatkan pendapatannya sangat terbatas, dengan investasi yang dijalankan hanya bisa menutupi biaya produksi yang ada (Apridar et al., 2019). Sementara itu, negara berkembang masih memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya ke titik keseimbangan (*steady state*) dari investasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Namun, hasil yang dicapai sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan situasi hingga tingkat perubahan perekonomian antarnegara. Variasi ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk keadaan sumber daya alam (SDA), kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan teknologi, serta tingkat produktivitas. Selain itu, keterlibatan pemerintah dan kebijakan yang dijalankan di tiap negara berefek pada implementasi kegiatan ekonomi. Semakin tinggi keterbukaan ekonomi dan integrasi global, semakin besar kesempatan bagi negara-negara tersebut meraih kemajuan ekonominya.

Hal ini teridentifikasi, bahwa negara-negara ini rentan akan gejolak global yang membutuhkan kebijakan serta tata kelola pemerintah yang bijak. Untuk menghindari jebakan MIT, strategi yang berfokus pada diversifikasi ekonomi, penguatan daya saing global, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan inovasi berbasis teknologi diperlukan sebagai upaya untuk pertumbuhan jangka panjang. Upaya ini bertujuan untuk mencapai konvergensi ekonomi serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan target SDGs 2030. Dengan ini, kesejahteraan yang menyeluruh bisa membuat negara-negara ini membuka kesempatan untuk keluar dari jebakan MIT. Namun, keberhasilannya bergantung pada keragaman faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di empat negara *middle income* ASEAN.

Dari perspektif teori neo-klasik (Solow-Swan) didukung oleh teori endogen, masuknya investasi asing langsung (FDI) bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengalirkan dana ke sektor yang minim modal, sehingga membuka kesempatan untuk meningkatkan akumulasi

modal hingga pertumbuhan ekonomi baik jangka panjang ataupun pendek (Setiana et al., 2023). Selain itu, FDI tidak hanya dipandang sebagai penyedia dana untuk akumulasi modal, tetapi juga mendorong eksternalitas ekspor dalam bentuk teknologi baru dalam fungsi produksi. Oleh karena itu, FDI dinilai lebih bermanfaat serta berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, yang memiliki permintaan investasi dan kebutuhan teknologi lebih tinggi dibandingkan negara maju (Iman & Wahyudi, 2024).

*Foreign Direct Investment* (FDI) adalah aliran modal yang dijalankan oleh perusahaan, individu maupun pemerintah dari satu negara ke lain negara (Purnomo & Mudakir, 2019). Setiap negara berusaha meningkatkan daya saing dan daya tariknya agar dapat menarik investasi dari perusahaan multinasional, dikarenakan FDI memiliki kontribusi yang krusial dalam mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga nilai tambah investasi menjadi sumber utama untuk menciptakan modal baru yang bisa bermanfaat menaikkan output. Hal tersebut selaras dengan publikasi Yuliana et al. (2023), yang menyebutkan bahwa FDI membawa efek positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, studi empiris yang dilakukan Andrawina et al. (2024) mengatakan bahwa FDI memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Fiduga faktor pertama ialah negara yang menerima FDI, terutama di sektor ekstraktif (kehutanan dan pertambangan), seringkali mengalami eksploitasi yang tidak berkelanjutan pada sumber daya alam serta degradasi lingkungan. Kondisi ini beresiko bagi lingkungan, karena

perekonomian sangat bergantung pada industri ekstraktif, sehingga aktivitas tersebut tidak selalu menguntungkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, perubahan kebijakan ekonomi atau fluktuasi harga komoditas global juga berefek pada pertumbuhan ekonomi. Dugaan faktor kedua, ketika perusahaan asing berinvestasi di suatu negara sering kali memutuskan untuk bersaing di pasar domestik. Meskipun hal ini bisa meminimalisasi biaya dan meningkatkan efisiensi produksi, pada akhirnya akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Globalisasi telah meningkatkan aliran FDI antarnegara. Di sisi lain, globalisasi juga menyatukan perekonomian berbagai negara melalui keterbukaan perdagangan (*Trade Openness*). Hal ini mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk meluaskan akses ke pasar ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Setiawan, Marselina, et al., 2023). Didukung oleh kebijakan yang dibuat *World Trade Organization* (WTO), *Trade Openness* dapat membantu meringankan hambatan untuk memperluas peluang pasar perdagangan internasional, seperti tarif atau non-tarif, kuota yang ditujukan untuk meningkatkan impor, kurs dan prosedur izin masuk administratif di seluruh dunia (Hossain et al., 2022).

Menurut World Bank (2024), *trade openness* diwakili oleh data *trade (% of GDP)*, yang mengacu pada rasio total barang dan jasa yang diimpor dan diekspor dibandingkan *Produk Domestik Bruto* (PDB) dalam satuan persen. *Trade openness* memberikan gambaran sejauh mana suatu negara ikut serta menjalankan perdagangan internasional, yang ditandai dengan tingginya nilai *trade openness* negara tersebut.

Menurut Dominick (2014), trade openness diyakini mampu memajukan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya keterbukaan ini, tiap negara memperoleh kesempatan untuk mendagangkan produk yang memanfaatkan sumber daya melimpah, sekaligus mengimpor barang yang sulit atau mahal untuk dibuat secara lokal. Berdasarkan hal tersebut, teori Hecksher-Ohlin menekankan bahwa perbedaan biaya peluang (opportunity cost) produk yang dihasilkan suatu negara mengakibatkan ketidakmampuan negara tersebut memenuhi kebutuhan lokal secara efisien. Namun, karena adanya sistem keterbukaan perdagangan dan kemampuan berbisnis dengan negara lain, memungkinkan negara yang tidak memiliki kelebihan sumber daya tertentu pun masih dapat memperoleh produk tersebut melalui perdagangan internasional (Setiawan, Darmawan, et al., 2023).

Dengan demikian, teori H-O memberikan pemahaman yang kuat bagaimana trade openness mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui penggunaan faktor produksi yang efisien dan memanfaatkan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang menguntungkan. Publikasi Duong et al. (2022) dan Iman & Wahyudi (2024) mendukung gagasan tersebut yang menyatakan bahwa trade openness berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun riset Nova et al. (2019) serta Elfaki et al. (2021) menemukan hasil sebaliknya, yakni trade openness berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana trade openness justru menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai research telah menganalisis faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan kemajuan perekonomiannya dari sisi FDI dan trade openness,

meskipun bantuan pemerintah beserta lembaga non-pemerintah dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Osiobe, 2019). Salah satu isu yang menjadi perdebatan dunia yang tidak pernah habis untuk dibahas adalah terkait hubungan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. Maraknya korupsi di suatu negara bisa memperlambat akumulasi modal dan pemanfaatan sumber daya dalam jangka panjang. Dampak ini berimbas pada ketertarikan investor untuk berinvestasi di negara tersebut (Kizilkaya et al., 2016). Akibatnya, banyak orang mempercayai bahwa korupsi ialah hambatan utama untuk meraih dua tujuan penting: kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan meningkatkan kemakmuran bagi 45% penduduk miskin di negara-negara berkembang. Selain itu, memberantas korupsi ialah tujuan inti dari SDGs, karena berdampak pada perekonomian serta pembangunan ekonomi (Ichvani & Sasana, 2019).

Transparency Internasional (2023) merupakan lembaga yang telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang diperlukan guna mengukur tingkat korupsi suatu negara dengan skala 0-100, dimana semakin tinggi nilai IPK, maka tingkat korupsi di suatu negara semakin rendah, sebaliknya jika nilai IPK lebih rendah mendekati nol, maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Korupsi diartikan sebagai salah satu perkara yang menantang dalam hal pembangunan, politik, ekonomi, serta sosial, terlepas dari cara korupsi diartikan dan dipandang. Hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi terus diperdebatkan oleh para peneliti maupun pembuat kebijakan (Amoh et al., 2022). Terdapat dua pendapat yang

memberikan pandangan berbeda terkait efek korupsi pada pertumbuhan ekonomi.

Pertama, "*sands the wheel*" berpendapat bahwa korupsi mengganggu investasi, menurunkan tingkat produktivitas, hingga mendistorsi distribusi sumber daya, yang pada gilirannya bisa mengperburuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian Damanik & Marta (2023) dan Alfada (2019) memperkuat pandangan ini, dengan menyatakan jika korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengganggu efisiensi pemerintahan serta menyebabkan proses produksi dan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Sedangkan kedua, "*grease the wheels*" mengambil pendapat yang bertolak belakang, yaitu korupsi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran dipercayai bisa mempercepat pengalokasian waktu dan menjamin proyek swasta paling efisien, karena investor dapat bekerja sama dengan birokrasi untuk menghapus dampak birokrasi. Pernyataan tersebut, diperkuat oleh publikasi Darmawati et al. (2021) serta Saha & Sen (2021) bahwa korupsi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Publikasi sebelumnya terkait studi konvergensi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Siahian et al. (2023) mengungkapkan adanya proses  $\sigma$ -convergence dan  $\beta$ -convergence di kawasan ASEAN. Namun, hasil ini berlawanan arah dengan studi Atmasari et al. (2020), yang memberi Kesimpulan bahwa tidak terjadinya  $\sigma$ -convergence maupun  $\beta$ -convergence. Berdasarkan hasil analisis konvergensi serta faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di atas, bahwasanya penelitian ini perlu dilakukan.

Dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi apakah, dalam jangka panjang, kesenjangan antarnegara *middle income* ASEAN akan semakin menyempit, serta apakah pertumbuhan negara dengan status *middle income* mampu mengejar keteringgalan untuk naik ke status *high-income*, sehingga terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi pada kawasan ini. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah faktor-faktor seperti FDI, Trade Openness, dan Transparency Index (korupsi) bisa mempengaruhi proses konvergensi. Dengan latar belakang yang serupa masih terbatas pada objek, lokasi, dan periode waktu yang sama, penulis terdorong untuk mengkaji isu ini lebih mendalam. Karena itu, studi ini mengangkat judul ***“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Negara Middle Income Trap ASEAN”***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah terjadi konvergensi sigma di negara *middle income* ASEAN?
2. Apakah terjadi konvergensi absolut dan konvergensi kondisional di negara *middle income* ASEAN?
3. Apakah Foreign Direct Investment (FDI), Trade Openness, dan Transparency Index (korupsi) dapat mempengaruhi proses percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi di negara *middle income* ASEAN?
4. Berapa besar kecepatan proses konvergensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan setiap tahunnya?

### **1.3. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui konvergensi sigma di negara *middle income* ASEAN.
2. Untuk mengetahui konvergensi absolut dan konvergensi kondisional di negara *middle income* ASEAN.
3. Untuk mengetahui pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Trade Openness, dan Transparency Index (korupsi) dalam proses percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi di negara *middle income* ASEAN.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kecepatan konvergensi yang dihasilkan setiap tahun.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, studi ini memfokuskan pada kajian konvergensi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di negara *middle income* ASEAN, yang diukur dengan GDP Per Kapita, apakah mengarah pada proses yang akan mengurangi kesenjangan (konvergen), atau sebaliknya dengan menggunakan metode konvergensi pertumbuhan ekonomi. Sementara, untuk mengetahui faktor-faktornya penelitian ini menggunakan variabel FDI, Trade Openness dan Transparency Index (korupsi) dengan menggunakan metode regresi data panel.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berikut beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk topik penelitian yang sejenis serta mampu digunakan sebagai sarana pembelajaran. Dengan temuan ini diharapkan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai proses terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi di antar negara *middle income* ASEAN.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan, studi ini bisa memperkaya literatur tentang fenomena *Middle Income Trap* (MIT) dan pengetahuan dalam merumuskan strategi untuk mengatasi keputusan terkait kebijakan pemerataan ekonomi di negara *middle income* ASEAN.